



Analisis Keberlangsungan Sanksi Ekonomi Uni Eropa Terhadap Rusia Yang Dianggap Menganeksasi Krimea Periode 2014-2019

Salma Afifa Fahmi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Crimea is an area that has been led by many countries, but since 1954 Crimea was given to Ukraine. After the collapse of the Soviet Union, Russia has been trying to take over Crimea so that it could return to Russia. This finally happened after the chaos in Ukraine appeared in 2013, which was caused by the Ukrainian leader that he would suspend talks on the Association Agreement. Utilizing the chaos, in early 2014 there was a sudden referendum in Crimea. The result of the referendum that the Crimean people's wanted to join Russia received a lot of criticism because it was considered violating international law so it considered annexing Crimea. The European Union then imposed economic sanctions on Russia in 2014. The purpose of this study is to find out the reasons behind why the European Union still maintains economic sanctions even though they do not have a large impact on Russia. This research is an explanative type research and is classified as a qualitative research using the Congruence Analysis method through literature study. To analyze the case, the concepts of identity and norms in the theory of constructivism will be used. The results of this study indicate that the reasons behind the EU economic sanctions are still maintained because Russia has not fully implemented the Minsk Agreement and the interests of the European Union uphold their commitment to identity as an organization committed to peace. However, EU economic sanctions do not have a big impact on Russia because EU member states still depend on oil and gas from Russia, so economic sanctions are only in the form of restrictions. This needs to be further evaluated by the European Union so that sanctions can be effective and make Russia change its policy towards Crimea.

Keywords : *European Union, Russia, Annexation of Crimea, Foreign Affairs, Economic sanctions, Constructivism, Identity, Norms, Peace, Humanity*

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi di Ukraina terkait aneksasi di Krimea oleh Rusia merupakan salah satu konflik di Benua Eropa yang belum menemukan titik terang hingga saat ini. Konflik ini bermula sejak tahun 2014. Rusia dinilai melanggar hukum internasional oleh banyak pihak karena merebut salah satu wilayah Ukraina secara sepihak melalui sebuah referendum. Untuk menanggapi pelanggaran yang dilakukan Rusia tersebut, Uni Eropa mengambil sikap dengan menjatuhkan sanksi ekonomi untuk membuat Rusia merubah

kebijakan luar negerinya. Sejak Perang Dingin berakhir, sebagian besar negara anggota Uni Eropa telah mengembangkan hubungan ekonomi dan politik yang erat dengan Rusia. Namun atas tindakan aneksasi di Krimea Uni Eropa justru memberikan sanksi kepada Rusia. Sedangkan terhadap Ukraina, Uni Eropa justru menyediakan dana bantuan kemanusiaan dan bantuan dalam bentuk barang kepada orang-orang yang paling rentan terkena dampak konflik di wilayah Donetsk dan Lugansk di Ukraina. (European Council, 2015, hal. 4)

Dalam menangani masalah di Krimea, Uni Eropa berfokus pada penurunan krisis yang terjadi dan juga membantu Ukraina dalam menciptakan kondisi yang stabil, sejahtera, dan demokratis bagi semua warga negaranya. Sanksi ekonomi oleh Uni Eropa dijatuhkan pada tanggal 31 Juli 2014 melalui Keputusan Dewan 2014/512/CFSP. Setelah itu, pada 12 Februari 2015 para pemimpin Jerman, Prancis, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina Timur yang dikenal dengan nama *Minsk Agreement II*. Perjanjian itu, yang mencakup gencatan senjata di Ukraina Timur, yang dimulai pada 15 Februari 2015 dan diikuti oleh penarikan senjata berat. Uni Eropa memandang implementasi penuh dari *Minsk Agreement* adalah dasar untuk penyelesaian konflik Krimea. (Bentzen, 2016, hal. 4)

Sanksi ekonomi bukanlah tindakan pertama yang dilakukan oleh Uni Eropa terkait aneksasi Krimea. Tanggapan pertama Uni Eropa terkait kasus tersebut adalah dengan melakukan upaya diplomatik. Pada saat pertemuan G-7 diadakan di Brussels pada 4-5 Juni 2014, Negara-negara Uni Eropa mendukung upaya negosiasi atas Rusia yang bergabung dengan OECD dan *International Energy Agency* (IEA). KTT Uni Eropa-Rusia juga dibatalkan dan Negara-negara anggota Uni Eropa memutuskan untuk tidak mengadakan KTT bilateral. Pembicaraan bilateral dengan Rusia mengenai masalah visa serta perjanjian baru antara Uni Eropa dan Rusia akhirnya ditunda. (European Union, 2019)

Moskow selalu memiliki rencana terbaik untuk mengurangi dampak negatif sanksi-sanksi tersebut. Sanksi Uni Eropa tersebut bertujuan untuk merubah kebijakan Rusia terkait Krimea, namun hingga akhir 2019 sanksi tersebut dinilai belum memiliki dampak terhadap Rusia dan Rusia juga tidak kunjung merubah kebijakan luar negerinya terkait dengan Krimea. Bahkan penurunan GDP Rusia yang cukup tajam sejak 2013 ternyata bukan diakibatkan oleh penjatuhan sanksi ini, melainkan karena harga minyak dunia yang sedang menurun tajam hingga tahun 2016. Seiring meningkatnya harga minyak, GDP Rusia juga kembali meningkat. (Welt, Archick, Nelson, & Rennack, 2020) Meskipun sanksi ekonomi Uni Eropa dinilai belum menunjukkan keberhasilan hingga akhir 2019, namun Uni Eropa masih terus memperpanjang sanksi ini. Bahkan saat ini sanksi telah diperpanjang hingga tahun 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dibalik terus diperpanjangnya sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia, karena sanksi ini justru merugikan perekonomian Uni Eropa dan tidak kunjung berdampak pada Rusia meskipun sudah berjalan lima tahun. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis menggunakan konsep identitas dan norma yang ada dalam teori konstruktivisme. Menurut Nicholas Onuf, “manusia senantiasa mengkonstruksi, atau membentuk, realitas sosial, bahkan dirinya sendiri”. Sehingga bukan struktur sosial yang menentukan perilaku aktor, bukan perilaku agen yang menciptakan struktur social, namun mereka berdua saling menciptakan satu sama lain (Onuf N. G., 1989, hal. 1) Salah satu tokoh yang berpengaruh terhadap konstruktivis, Alexander Wendt mengatakan jika elemen terpenting dalam Hubungan Internasional adalah gagasan atau identitas. Tidak hanya itu Wendt juga mengatakan jika “*identities are the basis of interest*”. (Wendt, 1992, hal. 398) Tindakan itu sendiri juga biasanya berdasarkan pada kepentingan ataupun tujuan yang hendak dicapai. Sehingga, identitas dapat membentuk kepentingan, sedangkan kepentingan membentuk tindakan. (Rosyidin, 2015, hal. 48) Negara merupakan aktor yang menghormati aturan yang telah mereka sepakati bersama. Penghormatan terhadap aturan yang telah disepakati ini dikarenakan keinginan negara untuk dipandang baik oleh negara lain. Sehingga

tindakan suatu negara bertindak atas pertimbangan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas (*logic of appropriateness*) daripada mempertimbangkan untung rugi (*logic of consequences*). (March & Olsen, 2004, hal. 3 dan Finnemore, 1999, hal. 2)

Hipotesis dalam penelitian ini adalah kebijakan Uni Eropa terkait terus diperpanjangnya sanksi ekonomi kepada Rusia dikarenakan adanya tujuan atas kepentingan tertentu yang ingin ditunjukkan. Salah satu tujuan yang ada didalamnya adalah adanya identitas dan norma yang dimiliki oleh Uni Eropa dan berkaitan dengan perdamaian, keamanan bersama dan kemanusiaan. Untuk memperkuat identitas dan norma yang hendak dicapai tersebut, maka Uni Eropa mengimplementasikannya melalui kebijakan luar negeri. Pengimplementasian kebijakan luar negeri Uni Eropa di Ukraina yaitu untuk menjaga perdamaian, memperkuat keamanan internasional, dan menjunjung norma kemanusiaan.

PEMBAHASAN

Sejak jaman Yunani kuno sampai 2014, wilayah Krimea banyak diperintah oleh negara dan kekaisaran, seperti bangsa Yunani, Bulgaria, Skit, Romawi, Gots, Hun, Khazar, Kievan Rus, Kekaisaran Bizantium, Venesia, Genoa, Kipchaks, Mongol Golden Horde, Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, Jerman, dan Ukraina. Sebelum menjadi bagian dari Ukraina, Krimea merupakan bagian dari *Soviet Federative Socialist Republic* (SFSR). Namun, atas campur tangan Nikita Khrushchev, Krimea menjadi wilayah Ukraina. Pada tahun 1954, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev memberikan hadiah kepada Ukraina, hadiah tersebut berupa wilayah Krimea. (Calamur, 2014)

Menyusul jatuhnya Uni Soviet pada Desember 1991, Armada Laut Hitam dibagi antara Rusia dan Ukraina. Karena pembagian tersebut, keberadaan armada Rusia di Sevastopol terus menerus menjadi fokus ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Bahkan Vladimir Putin dengan tegas menyatakan bahwa kehadiran armada Laut Hitam di Sevastopol adalah aktor kunci untuk keamanan Rusia. (Bebler, 2015, hal. 37) Populasi penduduk di Krimea sekitar 2.2 juta jiwa dengan beragam etnis yaitu Rusia (58,3%), Ukraina (24,3%), Tatar Krimea (12,1%) Belarusia (1,4%), dan sisanya Armenia, Bulgari, Jerman, Yunani, Karaim. (unpo.org, 2017) Data tersebut menunjukkan jika mayoritas dari masyarakat Krimea adalah etnis Rusia karena dalam sejarahnya, Ukraina memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Rusia.

Selain memiliki kedekatan dengan Rusia, Ukraina juga memiliki kedekatan dengan Uni Eropa. Sejak 2012 antara Ukraina dan Uni Eropa telah memulai negosiasi terkait dengan penurunan hambatan perdagangan dengan Uni Eropa. Namun dengan adanya dorongan Rusia, pada 21 November 2013, Presiden Ukraina pada saat itu, Viktor Yanukovich mengumumkan untuk menangguk pembicaraan tentang *Association Agreement* (AA) dengan Uni Eropa. (Yekelchyk, 2015) Akibatnya, pada November 2013 muncul berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan rakyat untuk menentang kebijakan tersebut. Gerakan demonstrasi tersebut bernama Euromaidan atau “Eurosquare”, yakni gelombang demonstrasi di Ukraina pada 21 November 2013 yang menginginkan Ukraina melakukan integrasi dengan Eropa.

Kekacauan yang bermula sejak 2013 tersebut masih berlanjut hingga awal tahun 2014. Memanfaatkan hal tersebut, pada bulan Februari 2014 Rusia mengirimkan pasukannya ke semenanjung Krimea. Hal ini sangat mengejutkan masyarakat Krimea itu sendiri. Bahkan pada 24 Februari 2014, *Sevastopol's city council* mengangkat warga negara Pro-Rusia sebagai walikota. (Amos, 2014) Tidak hanya itu, masyarakat internasional juga dikagetkan dengan agenda untuk melakukan Referendum tentang penyatuan kembali Krimea dengan Federasi Rusia. Agenda tersebut diberitahukan pada 27 Februari 2014 dalam pemberitahuan yang terlalu singkat. Namun, menurut pengakuan dari salah satu komandan milisi bernama Igor Girkin yang terlibat dalam pemberontakan di Ukraina Timur, pejabat Krimea bukanlah

peserta yang antusias dalam tindakan referendum tersebut, tetapi mereka dikumpulkan oleh paramiliter untuk mengadakan pemungutan suara resmi. Oleh karena itulah kemudian referendum tersebut dilakukan. (Krymr.org, 2015)

Pada akhirnya, referendum Krimea dilakukan pada tanggal 16 Maret 2014. Namun hasil referendum dianggap tidak wajar, sekitar 96% pemilih di Krimea mendukung untuk bergabung dengan Rusia. (bbc.com, 2014) Setelah hasil referendum keluar, pada 18 Maret 2014 sebuah Undang-Undang tentang penggabungan Krimea dan Sevastopol ke Federasi Rusia ditandatangani di Moskow. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengakui pemberian kewarganegaraan Rusia kepada warga Ukraina dan orang-orang tanpa kewarganegaraan secara permanen yang berdomisili di Krimea dan Sevastopol. (President of Russia, 2014)

Meskipun hasil dari referendum 2014 tersebut menyatakan jika 96% masyarakat Krimea menginginkan untuk bergabung dengan Rusia, namun tindakan Rusia yang mengakui bergabungnya Krimea dianggap sebagai aneksasi karena adanya keterlibatan dan dorongan pihak Rusia didalamnya. Bahkan setelah peristiwa referendum pada 16 Maret 2014, *Human Rights Monitoring Mission in Ukraine* (HRMMU) menerima banyak laporan tentang meningkatnya laporan pelecehan dan intimidasi terhadap masyarakat yang tidak mendukung referendum. (OHCHR, 2014)

Karena Rusia dinilai terlibat dalam proses referendum dan mengakui hasil referendum tersebut, maka Rusia dinilai melanggar Piagam PBB Artikel 2 (4) yang berbunyi: “*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations*”. Selain itu, perjanjian multilateral dengan beberapa negara yang menegaskan dan menjamin kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina seperti memorandum Budapest yang juga turut dilanggar oleh Rusia.

Atas pelanggaran tersebut, Uni Eropa kemudian menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Sanksi tersebut berupa pembatasan pinjaman dan investasi ; larangan impor dan ekspor perdagangan senjata ; larangan penjualan barang dan teknologi penggunaan ganda untuk militer Rusia ; dan larangan penjualan peralatan, teknologi, dan layanan untuk proyek pengembangan minyak yang terkait dengan *deepwater*, *Arctic offshore*, dan *shale exploration*. Sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan Keputusan Dewan 2014/512/CFSP, tanggal 31 Juli 2014. Penjatuhan sanksi tersebut juga sesuai dengan prinsip dasar penjatuhan sanksi Uni Eropa yaitu,

“Sanctions should be targeted in a way that has maximum impact on those whose behaviour we want to influence. Targeting should reduce to the maximum extent possible any adverse humanitarian effects or unintended consequences for persons not targeted or neighbouring countries. Measures, such as arms embargoes, visa bans and the freezing of funds are a way of achieving this.” (Council of The EU, 2004)

Uni Eropa terus berkomitmen untuk menstabilkan situasi di Krimea, maka dibuatlah kesepakatan untuk gencatan senjata melalui Perjanjian Minsk yang ditandatangani pada September 2015. Dalam Perjanjian Minsk hanya ada dua belah pihak yaitu Ukraina dan Rusia, sedangkan Perancis, Jerman, dan OSCE hanya mengawasi dan mengevaluasi. Namun tidak mudah untuk kembali menstabilkan situasi di Krimea, karena setelah penandatanganan tersebut pelanggaran masih sering terjadi. Kemudian dibuat lagi perjanjian gencatan senjata baru, yang disebut Perjanjian Minsk II dan ditandatangani pada 11 Februari 2015. (Dreger, Kholodilin, Ulbrich, & Fidrmuc, 2016, hal. 4)

Rusia merupakan salah satu negara pemasok utama minyak dan gas di dunia. (Fungáčová, Eller, & Fidrmuc, 2014) Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan ekspor mereka, 2/3 dari ekspor dan lebih dari 50% pendapatan anggaran Rusia berasal dari komoditas minyak dan gas. Rusia juga diketahui sangat bergantung pada pasar Eropa, dengan 45%

ekspornya ke Uni Eropa. Selain itu, lebih dari setengah anggaran Rusia berasal dari penjualan gas dan minyak ke Uni Eropa. Dari sisi Uni Eropa, perdagangan dengan Rusia mewakili hanya 9,7% dari total perdagangan Uni Eropa. (Ivan, 2014) Sehingga dengan adanya sanksi terkait pembatasan penjualan teknologi untuk proyek pengembangan minyak seharusnya akan berpengaruh pada kebijakan luar negeri Rusia karena adanya sanksi ekonomi Uni Eropa cukup berpengaruh pada perekonomian Rusia.

Sanksi dari Uni Eropa cukup melemahkan ekonomi Rusia, ekspor Uni Eropa ke Rusia menurun 20,7% setiap tahun antara 2013 hingga 2016, sebelumnya ekspor mereka telah meningkat 20% per tahun antara 2009 hingga 2012. (Christen, Fritz, Sinabell, & Hinz, 2017, hal. 39) Pada tabel dibawah ini menunjukkan jika ekspor dan impor antara Uni Eropa dan Rusia sempat mengalami penurunan sejak 2014. Namun, pada tahun 2017 hingga 2019 ekspor dan impor antara Uni Eropa dan Rusia mengalami peningkatan kembali. Hal ini menunjukkan, meskipun Uni Eropa terus memperpanjang sanksinya namun hal tersebut tidak berpengaruh pada penurunan perdagangan yang signifikan antara Rusia dan Uni Eropa.

Tabel 1. *Tabel Neraca Perdagangan Uni Eropa dengan Rusia (dalam juta €)*

Tahun	Total Ekspor	Total Impor	Neraca Perdagangan
2013	€ 114.801,70	€ 199.049,40	-€ 84.248
2014	€ 99.104,60	€ 174.706,80	-€ 75.602
2015	€ 70.456,00	€ 130.319,20	-€ 59.863
2016	€ 69.284,50	€ 113.945,70	-€ 44.661
2017	€ 82.771,60	€ 138.258,50	-€ 55.487
2018	€ 82.305,00	€ 160.901,90	-€ 78.597
2019	€ 87.787,40	€ 144.572,80	-€ 56.785

Sumber : Diolah dari (Eurostat, 2020)

Kebijakan luar negeri suatu negara sering kali dipengaruhi oleh sejarah negara tersebut ataupun berkaitan dengan identitas dan norma yang dipercaya. Pembentukan Uni Eropa melalui proses yang panjang dan juga waktu yang cukup lama. Selama berabad-abad, Eropa merupakan salah satu benua yang banyak memiliki konflik dengan anggotanya sendiri. Hal tersebut dikarenakan negara di Eropa saling ingin menguasai. Ketika PD II sudah berakhir sejak 1945, banyak negara yang berusaha untuk mengembalikan kondisi dan berniat untuk menciptakan perdamaian di Eropa itu sendiri. Hingga pada akhirnya, Menteri Luar Negeri Perancis saat itu, Robert Schuman mengusulkan untuk mengintegrasikan industri baja dan batu bara Eropa Barat pada 1950 yang berakhir pada pembentukan *European Coal and Steel Community* (ECSC) pada tahun 1951.

Perdamaian adalah tujuan utama dalam proses integrasi Eropa setelah Perang Dunia II. (Mäkinen, 2019, hal. 51) Bahkan pada tahun 2011, Dewan Uni Eropa juga sempat membuat suatu pernyataan yang berbunyi sebagai berikut, *“Preventing conflicts and relapses into conflict, in accordance with international law, is therefore a primary objective of the EU’s external action, in which it could take a leading role acting in conjunction with its global, regional, national and local partners”*. (Council of the EU, 2011) Oleh karena itu, Uni Eropa akan terus mendukung mitra lokal, regional, internasional, organisasi non-pemerintah yang berkaitan dan institusi yang dapat melakukan pencegahan, penyelesaian konflik dan memperkuat upaya perdamaian. Dalam sebuah kesempatan berpidato di Universitas Ulster, Irlandia Utara, pada 1 April 2004, Romano Prodi sebagai Presiden Komisi Eropa periode 1999-2004 menegaskan, *“We should never forget that the basic reason for the European*

integration process and the European Union is peace. That was the overriding objective of our founding fathers” (Prodi, 2014).

Uni Eropa berusaha untuk terus mempromosikan prinsip perdamaian, keamanan, perlindungan hak asasi manusia, ketaatan terhadap hukum dan pengembangan hukum internasional yang berhubungan dengan dunia luas. Hal tersebut dipertegas dalam Artikel 3(5) TEU yang berbunyi :

“In its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interests and contribute to the protection of its citizens. It shall contribute to peace, security, the sustainable development of the Earth, solidarity and mutual respect among peoples, free and fair trade, eradication of poverty and the protection of human rights, in particular the rights of the child, as well as to the strict observance and the development of international law, including respect for the principles of the United Nations Charter.” (European Union, 2008)

Sebagai pengakuan atas perannya dalam membantu mengubah sebagian besar Eropa dari benua perang menjadi benua perdamaian dan organisasi yang mempromosikan perdamaian dan demokrasi, Uni Eropa dianugerahi *Nobel Peace Prize* pada tahun 2012. (European Union, 2017) Uni Eropa dinilai berkontribusi selama lebih dari enam dekade bagi kemajuan perdamaian dan rekonsiliasi, demokrasi dan hak asasi manusia di Eropa. Uni Eropa dinilai telah melakukan perjuangan yang sukses untuk perdamaian dan rekonsiliasi dan untuk demokrasi dan hak asasi manusia. Stabilisasi Uni Eropa telah membantu mengubah sebagian besar Eropa dari benua perang menjadi benua perdamaian. Penganugerahan ini didasarkan pada peristiwa rekonsiliasi Uni Eropa. Peristiwa tersebut dimulai dari rekonsiliasi Jerman dan Perancis pada 1945 yang tidak terpikirkan. (The Nobel Prize, 2012)

Penjatuhan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa telah sesuai dengan Artikel 215 dalam TEU. Sanksi ekonomi kepada Rusia dijatuhkan sesuai tujuan dari CFSP yaitu agar negara non-UE merubah kebijakannya. *EU Common Position 2008* merupakan norma/aturan yang dirancang dengan berbagai sanksi baik sanksi diplomatik maupun sanksi ekonomi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang melanggar hukum internasional, hak asasi manusia atau kebijakan yang tidak menghargai hukum maupun prinsip-prinsip demokrasi. CFSP dapat memutuskan untuk memberlakukan tindakan pembatasan terhadap negara, entitas, atau individu ketiga. Langkah-langkah ini harus konsisten dengan tujuan CFSP, sebagaimana diatur dalam Artikel 21 *Treaty on European Union (TEU)*

“preserve peace, prevent conflicts and strengthen international security, in accordance with the purposes and principles of the United Nations Charter, with the principles of the Helsinki Final Act and with the aims of the Charter of Paris, including those relating to external borders”

Artikel tersebut menandakan jika dalam melakukan tindakan eksternal Uni Eropa harus mengilhami pembentukannya yang salah satunya bertujuan untuk perdamaian.

Dalam *Council Common Position 2008/944/CFSP* tersebut disebutkan di Artikel 2(4), dimana *“Member States shall deny an export licence if there is a clear risk that the intended recipient would use the military technology or equipment to be exported aggressively against another country or to assert by force a territorial claim.”* Oleh karena itu sesuai dengan *Common Position* tersebut, negara anggota harus mempertimbangkan konflik bersenjata yang ada di negara tujuan dan mempertimbangkan kemungkinan penggunaan peralatan militer yang di ekspor. Pada ayat keenam juga mengharuskan negara anggota Uni Eropa untuk mempertimbangkan perilaku negara tujuan ekspor terhadap komunitas internasional, serta

sikapnya terhadap hak asasi manusia yang berlaku dalam masyarakat internasional. (European Union, 2008)

Keputusan Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi memang tidak jauh dari *Common Position 2008*. Oleh karena itu, norma yang ada dalam *Common Position* tersebut mendefinisikan mengenai tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, serta pantas atau tidak pantas untuk dilakukan terkait dengan ekspor teknologi dan barang militer untuk negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa tetap menjatuhkan sanksi ekonomi meskipun Uni Eropa merugi dalam perdagangannya dengan Rusia. Dalam konstruktivisme, tindakan Uni Eropa tersebut didasarkan pada logika kepatantasan atau *logic of appropriateness*. (Finnemore, 1999, hal. 2) Logika kepatantasan memandang jika suatu negara tidak melihat apakah norma memenuhi kepentingannya atau tidak, tetapi norma justru memberikan makna mengenai tindakan yang baik dan pantas untuk dilakukan.

Menurut konstruktivis, perilaku suatu negara didorong intersubyektivitas atau penafsiran aktor terhadap aktor lainnya. Intersubyektivitas tersebut kemudian membentuk identitas yang membentuk persepsi mereka. Identitas adalah atribut sosial yang sengaja diciptakan dalam proses interaksi dan bisa berubah kapanpun ketika persepsi berubah. Uni Eropa merupakan organisasi regional yang terbentuk dari komunitas ekonomi, dimana komunitas tersebut dalam pembentukannya tidak lagi didorong oleh egoisme. Mereka menyerahkan kepentingan demi kepentingan bersama. Terbentuknya Uni Eropa salah satunya untuk menghindari peperangan seperti yang terjadi sebelumnya. Untuk memperkuat norma dan identitas yang dimiliki maka diwujudkan dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa, salah satunya dengan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Rusia karena aneksasi Krimea.

Dalam konstruktivis, identitas dimaknai sebagai atribut yang melekat pada diri aktor yang kemudian mendorong tindakan. (Wendt, 1999, p. 224) Identitas yang menjadi alasan Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi ekonomi adalah identitas yang dibangun untuk menciptakan perdamaian. Perdamaian juga merupakan tujuan utama dalam proses integrasi Eropa setelah Perang Dunia II. Berdasarkan tipologi identitas yang dikemukakan oleh Wendt, identitas Uni Eropa termasuk dalam *Collective identity* dimana identitas ini berdasarkan suatu solidaritas antar negara anggotanya. Identitas tersebut diwujudkan dalam *Declaration on European Identity 1973*, *Treaty on European Union 1992* dan *Treaty of Lisbon 2007*. Dokumen-dokumen tersebut berusaha untuk membangun sebuah identitas Uni Eropa dimana sebelumnya negara anggotanya saling berperang satu sama lain, namun setelah tergabung dalam Uni Eropa mereka justru bekerjasama untuk menciptakan perdamaian.

Dalam ketiga dokumen tersebut menyatakan jika tujuan pendirian Uni Eropa adalah perdamaian. Seperti yang dijelaskan oleh Peter Katzenstein, identitas mempengaruhi kebijakan melalui penentuan kepentingan, tetapi hal tersebut juga dapat membentuk kebijakan secara langsung sebagai hasil dari politik identitas suatu negara. (Katzenstein, 1996) Identitas Uni Eropa yang berkomitmen untuk menciptakan perdamaian membentuk kepentingan nasional Uni Eropa yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri tersebut diwujudkan dalam partisipasi Uni Eropa dalam sebuah konflik untuk menciptakan perdamaian. Oleh karena itu Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia dan memberikan bantuan kepada Ukraina.

Tindakan Uni Eropa dalam memperpanjang sanksi meskipun terus mengalami kerugian dan tidak berdampak besar terhadap Rusia dikarenakan identitas Uni Eropa yang berkomitmen untuk menciptakan perdamaian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, identitas membentuk kepentingan, sedangkan kepentingan membentuk tindakan. Identitas yang dibangun oleh Uni Eropa membentuk kepentingan yang diwujudkan dalam kebijakan luar negerinya. Dalam kebijakan luar negerinya, Uni Eropa berusaha untuk terlibat dalam penyelesaian konflik yang didasarkan pada penghormatan aturan internasional guna menciptakan dan menjaga perdamaian.

Kebijakan luar negeri Uni Eropa yang tertuang dalam *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) kemudian membentuk tindakan yaitu penjatuhan sanksi ekonomi kepada Rusia. CFSP ini juga merupakan norma yang dianut oleh Uni Eropa, dimana penjatuhan sanksi ekonomi ini berdasarkan pada Council Common Position 2008/944/CFSP. Sehingga sanksi ekonomi yang terus diperpanjang oleh Uni Eropa ini tidak hanya didukung oleh identitas yang dibangun oleh Uni Eropa untuk menciptakan perdamaian namun juga karena adanya tuntutan dari norma Uni Eropa sendiri. Norma dan identitas memang saling berkaitan erat karena identitas berada pada level unit atau agen, sedangkan norma berada pada level struktur. Keduanya kemudian dapat menjelaskan kebijakan suatu negara.

Meskipun dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa terdapat kerugian yang dialami, namun tindakan tersebut sudah dipertimbangkan. Uni Eropa memiliki reputasi yang melekat dalam tatanan internasional. Oleh karena itu untuk dapat terus mempertahankan reputasi baiknya dalam kancah internasional, Uni Eropa kemudian mematuhi norma yang telah disepakati bersama dengan negara anggotanya. Hal ini sesuai dengan buku Finnemore, negara sebagai aktor juga cenderung melakukan suatu tindakan karena mereka dituntun oleh prinsip, nilai, dan juga aturan yang telah disepakati bersama. (Finnemore, 1999, hal. 22) Dengan mematuhi norma yang telah disepakati bersama tersebut, Uni Eropa akan mendapatkan reputasi yang baik. Meskipun rugi dalam perekonomian, namun reputasi Uni Eropa tetap akan dipandang baik karena penjatuhan sanksi ekonomi tersebut merupakan salah satu tindakan yang pantas untuk dilakukan. Oleh karena itu, norma tertulis tersebut kemudian menjadi faktor pendorong Uni Eropa dalam menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa identitas Uni Eropa sebagai organisasi yang berkomitmen terhadap perdamaian dan norma tertulis Uni Eropa menjadi dasar pembentukan kebijakan luar negeri Uni Eropa terkait dengan penjatuhan sanksi ekonomi kepada Rusia. Identitas Uni Eropa terkait perdamaian menjadikan Uni Eropa terlibat dalam konflik yang dapat mengancam perdamaian. Identitas yang dibentuk sejak pembentukan ECSC kemudian diwujudkan dalam *Treaty on European Union* (TEU) dan kebijakan luar negeri yang kemudian membentuk tindakan Uni Eropa dalam penjatuhan sanksi ekonomi yang juga didukung oleh norma tertulis Uni Eropa. Tindakan ini dilakukan karena adanya kekhawatiran Uni Eropa terhadap barang-barang dari Uni Eropa yang di ekspor ke Rusia justru digunakan untuk mengacaukan perdamaian di wilayah Krimea.

Dengan demikian, dapat disimpulkan jika sanksi ekonomi masih terus diperpanjang karena tindakan tersebut dianggap sebagai tanggung jawab Uni Eropa untuk membantu Ukraina dalam mewujudkan perdamaian yang diatur dalam *EU Common Position 2008*. Sanksi ekonomi kepada Rusia juga merupakan suatu kepentingan tersendiri bagi Uni Eropa, yaitu komitmen Uni Eropa terhadap norma kemanusiaan dan cerminan identitas kolektif Uni Eropa untuk menciptakan perdamaian. Penjatuhan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa ini juga dapat menjadi contoh bagi negara lain agar tidak selalu mempertimbangkan untung rugi secara material dalam melakukan suatu tindakan terhadap negara lain. Hal ini juga membuktikan asumsi dalam konstruktivis jika unsur material bukanlah elemen penting dalam Hubungan Internasional, karena norma dan identitas juga turut berperan penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara.

REFERENSI

Amos, H. (2014, Februari 2014). *Ukraine: Sevastopol installs pro-Russian mayor as separatism fears grow*. [online]. Dalam

- <https://www.theguardian.com/world/2014/feb/25/ukraine-sevastopol-installs-pro-russian-mayor> [Diakses 6 Agustus 2020]
- bbc.com (2014). *Crimea referendum: Voters 'back Russia union'*. [online]. Dalam <https://www.bbc.com/news/world-europe-26606097> [Diakses 31 Maret 2020]
- Bebler, A. (2015, Maret). Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict. *Journal of European Affairs, 15*: 33-54.
- Bentzen, N. (2016, Januari). Ukraine and the Minsk II agreement : On a frozen path to peace? *European Parliamentary Research Service*, 1-8.
- Calamur, K. (2014). *Crimea: A Gift To Ukraine Becomes A Political Flash Point*. [online]. Dalam <https://www.npr.org/sections/parallels/2014/02/27/283481587/crimea-a-gift-to-ukraine-becomes-a-political-flash-point> [Diakses 29 Maret 2020]
- Christen, E., Fritz, O., Sinabell, F., & Hinz, J. (2017). Russia's and the EU's sanctions: economic and trade effects, compliance and the way forward. *The Official Journal of the European Union*, 1-57.
- Council of The EU. (2004). *Basic Principles on the Use of Restrictive Measures (Sanctions)*. [online]. Dalam <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010198%202004%20REV%201> [Dipetik 16 April 2020]
- Council of the EU. (2011). Council conclusions on conflict prevention. Luxembourg: Council of the EU.
- Dabrowski, M. (2019, Desember). Factors determining Russia's long-term growth rate. *Russian Journal of Economics 5*, 328–353.
- Dreger, C., Kholodilin, K. A., Ulbrich, D., & Fidrmuc, J. (2016, Mei). Between the hammer and the anvil: The impact of economic sanctions and oil prices on Russia's ruble. *Journal of Comparative Economics, 44*(2), 295-308. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jce.2015.12.010> [online].
- European Council. (2015). *Informal meeting of heads of state or government, 12 February 2015*. [online]. Dalam <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/02/12/> [Diakses 1 Maret 2020]
- European Union. (2017, Maret 1). The European Story 60 years of shared progress. *European Political Strategy Centre*, 1-32. doi:https://ec.europa.eu/assets/epsc/files/the-european-story_epsc_web.pdf [online].
- European Union. (2008). Consolidated version of the Treaty on European Union. Article 3.5.
- European Union. (2008, Desember 8). *Council Common Position 2008/944/CFSP. Concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine*.
- European Union. (2019). *EU sanctions against Russia over Ukraine crisis*. [online]. Dalam https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu-sanctions-against-russia-over-ukraine-crisis_en [Diakses 15 September 2019]
- Eurostat. (2020, Maret 18). *Extra-EU27 (from 2020) trade, by main partners, total product*. [online]. Dalam <https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tet00021> [Diakses 4 April 2020]
- Finnemore, M. (1999). *National Interests in International Society*. Cornell University Press.
- Fungáčová, Z., Eller, M., & Fidrmuc, J. (2014, Januari 1). Fiscal Policy and Regional Output Volatility: Evidence from Russia. *SSRN Electronic Journal*, 1849-1862. doi:<https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1064884> [online].
- Katzenstein, P. J. (1996). *The culture of national security : norms and identity in world poitics*. New York: Columbia University Press.

- Krymr.org. (2015). *Girkin: 'Militia' Pressured Crimean Deputies into the Auditorium for Voting* [Гиркин: «Ополченцы» сгоняли крымских депутатов в зал для голосования]. [online]. Dalam <https://ru.krymr.com/a/26811484.html> [Diakses 6 Agustus 2020]
- Mäkinen, K. (2019, Januari). Interconceptualizing Europe and Peace: Identity Building Under the European Heritage Label. *Dissonant Heritages and Memories in Contemporary Europe*, 51-78. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-11464-0_3 [online].
- OHCHR. (2014). *Report on the human rights situation in Ukraine*. [online]. Dalam <https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/HRMMUReport15May2014.pdf> [Diakses 9 Agustus 2020]
- Onuf, N. (1989). *World of Our Making : Rule and Rule of Social Theory and International Relations*. Columbia: University of South Carolina Press.
- President of Russia. (2014,). *Laws on Admitting Crimea and Sevastopol to the Russian Federation*. [online]. Dalam <http://en.kremlin.ru/acts/news/20625> [Diakses 30 Juni 2020]
- Prodi, R. (Performer). (2014, April 1). *Europe and peace*. University of Ulster. [online]. Dalam https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_04_170 [Diakses 30 Juli 2020]
- Rosyidin, M. (2015). *The Power of Ideas : Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- The Nobel Prize. (2012). *The Nobel Peace Prize 2012*. [online]. Dalam <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2012/summary/> [Diakses 3 Mei 2020]
- unpo.org. (2017,). *Crimean Tatars*. [online]. Dalam <https://unpo.org/members/7871> [Diakses 20 Maret 2020]
- Welt, C., Archick, K., Nelson, R. M., & Rennack, D. E. (2020). U.S. Sanctions on Russia. *Congressional Research Service*, 1-75.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what States Make of it : The Social Construction of Power Politics. *International Organization*, 45(2), 391-425.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yekelchik, S. (2015). *The Conflict in Ukraine, What Everyone Needs to Know*. Oxford: Oxford University Press.